



AKUNTANSI PAJAK DEWANTARA

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA



JURNAL.USTJOGJA.AC.ID

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta)

Sri Ayem^{1*}

Irmaningtyas Dwi Rahayu²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

*email: sriayemfeust@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of internal control systems, accessibility, the application of accrual-based government accounting standards (SAP) and disclosure of financial statements to the accountability of regional financial management in the Yogyakarta City Government. The approach used in this study is a quantitative approach. The type of data used in this study is primary data. The population of this study is the financial department employees who work in each SKPD of the Yogyakarta City Government and questionnaires were distributed as many as 73 questionnaires. Purposive sampling was used in this study. The data analysis in this study is multiple linear regression with SPSS version 16. The regression test results indicate that the internal control system has a positive effect on financial management accountability while the accrual-based government accounting standard (SAP) does not affect regional financial management accountability in the Yogyakarta City Government.

INFO ARTIKEL

Diterima: 2020-01-11
Direview: 2019-01-22
Disetujui: 2019-03-14
Terbit: 2020-10-04

Keyword:

Regional Financial
Management Accountability;
Internal Control System;
Accessibility; Application of
Accrual-based Government
Accounting Standards (SAP);
Financial Statement
Disclosures

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governances*). Untuk mewujudkan *good governance* kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan negara. Salah satunya adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahan yaitu adanya standar akuntansi pemerintah. Hal tersebut ditandai dengan di terbitkannya undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sesuai dengan undang-

undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam rangka penyelenggaraan *good governance* pemerintah dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan *good governance*.

Akuntabilitas pengelolaan negara dapat diwujudkan dengan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD. Masyarakat berhak untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah serta menuntut pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik.

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. sehingga dibutuhkan suatu sistem yaitu sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern harus memuat prosedur rekonsiliasi antara data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah (PP No. 8 Tahun 2006). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Penerapan sistem pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan terhadap kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*.

Untuk meningkatkan akuntabilitas tidak hanya menggunakan sistem pengendalian intern saja, melainkan juga didukung dengan aksesibilitas laporan keuangan, penerapan standar akuntansi (SAP) pemerintah berbasis akrual serta pengungkapan laporan keuangan. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah. Sedangkan standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

KSAP telah menyusun standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dengan PP nomor 71 tahun 2010 untuk melaksanakan ketentuan tentang keuangan negara, mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran dan belanja. Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya (*cost*) pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat diperlihatkan melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan. Pengungkapan berarti tidak menutupi atau menyembunyikan. Pengungkapan laporan keuangan merupakan keseluruhan informasi yang diungkap secara rinci yang jelas dan nada didalam laporan keuangan.

Sebagai bahan perolehan keyakinan tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN), BPK melakukan pengujian kepatuhan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. BPK menemukan bahwa Kota Yogyakarta tidak tertib administrasi. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tidak mampu merealisasikan pajak reklame sebesar Rp 953,2 juta, tidak tertib administrasi pengelolaan sampah dan kekurangan bayar Rp 363 juta atas restribusi sampah. Temuan BPK tersebut terdiri dari 11 temuan yang terdiri atas enam temuan ketidakpatuhan dan lima temuan terkait sistem pengendalian intern (SPI). Hal ini tercantum dalam laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 05/LHP/XVIII.YOG/01/2017. Dengan adanya kasus tersebut, maka sangat diperlukan adanya peningkatan akuntabilitas publik yang tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Negara.

Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil

pemeriksaan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2018. Meskipun mendapat opini WTP namun BPK masih menemukan temuan dalam sistem pengendalian internal, serta kurang cepatnya input transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam sistem informasi manajemen pengelolaan barang persediaan (simbada). Dengan adanya kasus tersebut, maka sangat diperlukan adanya peningkatan akuntabilitas publik yang tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan serta pengendalian.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan Tyasta (2017) yang berjudul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Semarang)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tempat penelitian, mengganti variabel penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan menambah variabel pengungkapan laporan keuangan. Maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Aksesibilitas, Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”.

Teori Stewardship

Stewardship theory merupakan suatu keadaan dimana manajer sebagai *steward* lebih berfokus pada kepentingan bersama atau tujuan organisasi bukan pada keinginan pribadi (Donaldson dan Davis, 1989). Implikasi *Stewardship theory* menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal Dewi dkk. (2017). Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah yang dipercaya oleh publik untuk bertindak dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Teory Agency

Teori keagenan pada dasarnya muncul karena adanya konflik kepentingan antara principal dan agen. Teori ini mengasumsikan adanya tujuan yang berbeda *antara principal* dan *agent*. Menurut teori keagenan, pengelolaan pemerintah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan teori ini hubungan antara masyarakat dan pemerintah merupakan sebuah hubungan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini dalam hal aktivitas dan kinerja kepada masyarakat selaku pemberi dana kepada pemerintah.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpangan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*). Akuntansi vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan akuntabilitas horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Kualitas pemerintah yang baik juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti *responsiveness*, *consensus orientation*, *equity efficiency*, *effectiveness* dan *strategic vision*. Hal ini sesuai dengan karakteristik pelaksanaan pemerintah yang baik menurut UNDP dan World Bank. Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi public antara lain, yaitu :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum yaitu akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas Proses yaitu terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya.
3. Akuntabilitas program yaitu terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak akan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pemina, pengurus dan pengawasan atas kebijakan-kebijakan yang di ambil.

Sistem Pengendalian Intern

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur sistem pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu :

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penilaian Risiko
- c. Kegiatan pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi
- e. Pemantauan

Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas merupakan kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik akan mewujudkan komunikasi yang baik antara publik dan pemerintah. Proses inilah yang mendukung penggunaan informasi keuangan daerah yang efektif (Sari, 2017). Berdasarkan hal tersebut aksesibilitas yang efektif dapat terjadi tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun penggunaan informasi yang dapat dibaca dan dipahami, semakin mudah publik mengakses informasi mengenai laporan keuangan pemerintah maka aksesibilitas akan semakin efektif pada SKPD tersebut. Hal ini tentu saja akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Akses ini diberikan oleh media, seperti majalah, surat kabar, stasiun televisi, radio, dan *website* (internet); dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua

Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Akrua membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrua menjadi basis akrua penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Dengan ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi Pemerintahan berbasis akrua telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti juga bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrua (Widyastuti, Sujana, & Adiputra, 2015). Akuntansi berbasis akrua adalah suatu basis suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan

Pengungkapan Laporan Keuangan daerah

Pengungkapan laporan keuangan dalam arti luas berarti penyampaian informasi. Sedangkan menurut para akuntansi memberi pengertian penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan atau pemerintah dalam bentuk laporan keuangan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan pengungkapan merupakan suatu penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan maupun media komunikasi pendukung lainnya tentang suatu perusahaan atau pemerintah (Neliana, 2017).

Suhardjanto (2011) dalam Medynatul (2017) Menyatakan pengungkapan dalam laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku.

2. Pengungkapan Sukarela (*Valuntary Disclosure*)

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Sedangkan dari sumber PSAK dapat disimpulkan bahwa informasi lain atau informasi tambahan (telaahan keuangan yang menjelaskan karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja perusahaan, posisi keuangan perusahaan, kondisi ketidakpastian, laporan mengenai lingkungan hidup, laporan nilai tambah) adalah merupakan pengungkapan yang dianjurkan (tidak diharuskan) dan diperlukan dalam rangka memberikan penyajian yang wajar dan relevan dengan kebutuhan pemakai.

tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Motif pelaporan keuangan dilakukan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas, berarti mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan,
2. Manajemen, dimaksudkan membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan antar generasi, yaitu membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan kut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-undang dibidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi Pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Intansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal dengan Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut. Pengendalian tidak dapat berjalan dengan baik, efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik. Oleh karena itu pemerintah harus dapat mencapai tujuan organisasi

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian Tyasta (2017), Hasibun & Hidayah (2018), Santoso (2016) menyatakan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun hasil penelitian lain Putri (2018) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H₁: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan, tidak sekedar menyampaikan ke DPRD, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah (Fauziya & Handayani, 2017). Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan saja tidak akan cukup apabila dari proses mendapatkan informasi hasil kerja suatu entitas. Oleh sebab itu akses masyarakat sebagai fungsi pengawasan aparat pemerintah berkaitan dengan laporan keuangan cukup mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Sari (2017) semakin baik aksesibilitas laporan keuangan sebuah SKPD maka akan semakin baik akuntabilitas laporan keuangan instansi tersebut. Hal ini karena jika suatu SKPD membuat laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik maka instansi tersebut memberikan keleluasaan bagi pihak-pihak yang ingin mengakses laporan pertanggungjawaban yang dibuatnya.

Penelitian Amin (2016), Tyasta (2017), Wahida (2015) dan Putri (2017) menyatakan aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun penelitian lain Aprilia et al., (2015), Hasibun & Hidayah, (2018) dan Putri (2018) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas yang efektif tergantung pada akses publik, dengan menyediakan akses yang mudah bagi para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui dan mendapatkan laporan keuangan. Semakin mudah di akses semakin memperbesar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H₂: Aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan akuntansi berbasis akrual menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya, akurat, komprehensif dan relevan. Akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas.

Penerapan standar akuntansi berbasis akrual juga dapat menilai kinerja keuangan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif, adanya responsibilitas terhadap keluhan masyarakat atau dewan, dan laporan keuangan yang disajikan merupakan hasil audit oleh Inspektorat maupun BPK, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Fatonah Nurul, 2017). Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan dipemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas (Widyastuti et al., 2015).

Penelitian yang dilakukan Riana (2017), Fatonah (2017) yang menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya penerapan SAP berbasis akrual akan mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan baik, tentunya akan mendorong kinerja pemerintah bekerja secara optimal dalam menjalankan aturan dan program-program pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil kinerja kepada publik.

H₃: Penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh pengungkapan laporan keuangan terhadap akuntabilitas Pengelolaan keuangan

daerah

Pengungkapan laporan keuangan merupakan keseluruhan informasi yang diungkapkan secara rinci yang jelas dan ada didalam laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas publik yang menggambarkan kondisi tentang kegiatan operasional, posisi keuangan, arus kas, dan penjelasan atas pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan tersebut.

Penyediaan informasi tersebut untuk kepentingan transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat diperlihatkan melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan yang menekankan pada ukuran dan pengevaluasian kinerja keuangan maupun pelayanan, mendorong pengungkapan dan pengkomunikasian hasil-hasil informasi kepada pihak yang memiliki kepentingan dalam laporan keuangan.

Penelitian Fadli (2017) menyatakan bahwa pengungkapan Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun penelitian Sukhemi (2016) yang menyatakan bahwa pengungkapan laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

H4: Pengungkapan laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti realitas atau gejala atau fenomena yang dapat diklarifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat pada populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2016)

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan yang bekerja di setiap SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta, sampel penelitian adalah pegawai keuangan di setiap SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta. Dari populasi tersebut, peneliti akan menggunakan pengambilan sampel *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tersentu, dengan kuesioner yang disebar atau dibagikan secara langsung kepada Pejabat bagian keuangan yang bekerja di setiap SKPD yang ada pada Pemerintah Kota Yogyakarta

Sumber dan Metode Pengumpulan data

Sumber data yang dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa perantara), sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mendatangi dan membagikan kuesioner secara langsung kepada pejabat, para staf, dan pegawai di masing-masing Dinas pada satuan kerja pemerintah daerah yang ada dikantor Pemerintahan Kota Yogyakarta. Teknik ini memberikan pertanggungjawaban kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan.

Metode Analisis Data**Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari jumlah sampel, nilai ini maksimum dan minimum, nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi. Software SPSS versi 16 digunakan untuk menguji data penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik**Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk

jumlah sampel kecil (Ghozali, 2018). Uji statistik *non Parametrik Kolmogorov Smirnov* (K-S) dasar pengambilan keputusan adalah dilihat dari nilai signifikan, apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal (Ghozali, 2018)

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Uji multikolonieritas ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabel bebas terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 atau nilai VIF 10. Jadi multikolonieritas terjadi jika nilai *tolerance* < 0,10 atau nilai VIF > 10 (Ghozali,2018).

Uji Autokorelasi

uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini (t) dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1). Autokorelasi muncul karena adanya observasi berurutan dan berkaitan satu sama lain. Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan model *Durbin Watson* (DW-Test).

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Dengan probabilitas signifikan diatas tingkat kepercayaan 5%, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan jika dibawah 5% maka, terindikasi masalah heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh responden pada setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Jumlah sampel sebanyak 59. Pengujian statistik deskriptif menggunakan program SPSS.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Pengendalian Intern	59	30.00	50.00	40.9831	3.84838
Aksesibilitas LK	59	7.00	30.00	24.0508	3.31883
Penerapan SAP Basis Akrua	59	24.00	35.00	28.0339	2.43513
Pengungkapan LK	59	13.00	20.00	15.9831	1.47965
Akuntabilitas	59	30.00	50.00	42.1186	3.77416
Valid N (listwise)	59				

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 1 tersebut menunjukkan statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian sebagai berikut:

- Hasil statistik deskriptif terhadap variabel sistem pengendalian intern menunjukkan nilai minimum sebesar 30,00, nilai maksimum sebesar 50,00 dengan rata-rata sistem pengendalin intern sebesar 40.9831 dan standar deviasi 3.84838.

- b. Hasil statistik deskriptif terhadap variabel aksesibilitas laporan keuangan menunjukkan nilai minimum sebesar 7.00, nilai maksimum 30.00, rata-rata aksesibilitas laporan keuangan 24.0508, dan standar deviasi 3.31883.
- c. Hasil statistik deskriptif terhadap variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual menunjukkan nilai minimum sebesar 24.00, nilai maksimum 35.00, rata-rata penerapan SAP berbasis akrual 28.0339, dan standar deviasi 2.43513.
- d. Hasil statistik deskriptif terhadap variabel pengungkapan laporan keuangan menunjukkan nilai minimum sebesar 13.00, nilai maksimum 20.00, rata-rata pengungkapan laporan keuangan 15.9831, dan standar deviasi 1.47965.
- e. Hasil statistik deskriptif terhadap variabel akuntabilitas menunjukkan nilai minimum sebesar 30.00, nilai maksimum 50.00, rata-rata akuntabilitas laporan keuangan daerah 42.1186, dan standar deviasi 3.77416.

Hasil Uji Simultan (F)

Tabel 2. Hasil Uji Signifikansi Simultan (*F-Test*)

ANOVA					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	338.993	4	84.748	9.394	.000 ^a
Residual	487.176	54	9.022		
Total	826.169	58			

- a. Predictors: (Constant), Pengungkapan LK, Aksesibilitas, SPI, SAP basis akrual
- b. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan keuangan

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (*F-Test*) pada tabel 2. nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen (sistem pengendalian intern, aksesibilitas, standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, pengungkapan laporan keuangan) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah).

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji statistik koefisien determinasi pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi independen. Hasil uji statistik koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.8. Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi.

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.641 ^a	.410	.367	3.000363

- a. Predictors: (Constant), Pengungkapan LK, Aksesibilitas, SPI, SAP basis akrual
- Sumber: data primer diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 3. diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,367 artinya besarnya pengaruh dari sistem pengendalian intern, aksesibilitas laporan keuangan, penerapan SAP berbasis akrual dan pengungkapan laporan keuangan sebesar 37% dan sisanya 63% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Variabel-variabel lain yang mungkin mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah seperti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penyajian laporan keuangan.

Hasil Uji Hipotesis

Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis, penelitian ini menguji signifikansi koefisien variabel independen Sistem Pengendalian Intern (X1), Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2), Penerapan SAP Berbasis Akrual (X3), Pengungkapan Laporan Keuangan (X4) terhadap variabel dependen Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).

Tabel 4. Hasil Uji Signifikansi Parsial (*t-Test*)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	12.523	5.182		2.416	.019
	SPI	.418	.145	.426	2.881	.006
	Aksesibilitas	.137	.155	.121	.889	.378
	SAP Basis Akruar	.265	.231	.171	1.147	.256
	Pengungkapan LK	.109	.386	.043	.281	.780

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Pengujian regresi linear berganda digunakan untuk melihat apakah variabel bebas digunakan dalam penelitian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian signifikansi dilakukan untuk menguji apakah variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y.

Berdasarkan tabel 4. tersebut dapat dijelaskan:

a. Pengujian Hipotesis 1

Hasil uji hipotesis 1 menyimpulkan bahwa program sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan uji *t-test*, hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baiknya sistem pengendalian akuntansi atau kontrol terhadap anggaran tersebut maka penerapan penganggaran akan semakin memenuhi target atau sasaran yang diharapkan, sehingga dengan adanya pengendalian intern pemerintah akan menjadi bukti nyata penyelenggaraan pemerintah yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik dan menjamin akuntabilitas pemerintah.

Penelitian ini dibuktikan dengan hasil uji t hitung 2,881 lebih tinggi dari t tabel 1,673 dan tingkat signifikansinya sebesar $0,006 < 0,05$, serta dibuktikan dari presentase sebaran frekuensi pada kategori sedang yaitu sebesar 66,1%. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tyasta (2017); Hasibun & Hidayah (2018) dalam penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

b. Pengujian Hipotesis 2

Hasil uji hipotesis 2 menyimpulkan bahwa aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan uji *t-test*, hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan bagi para pengguna ternyata belum mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dibuktikan dengan hasil t hitung 0,889 lebih rendah dari t tabel 1,673 dan tingkat signifikansi sebesar $0,378 > 0,05$ serta dibuktikan dari presentase sebaran frekuensi pada kategori tinggi sebesar 74,6%. penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia *et al* (2015); Hasibun & Hidayah (2018) dan Putri (2018) yang menyatakan bahwa aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Yogyakarta.

c. Pengujian Hipotesis 3

Hasil uji hipotesis 3 menyimpulkan bahwa penerapan SAP berbasis akruar tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Yogyakarta. Penelitian ini dibuktikan dengan hasil uji t hitung 1,147 lebih rendah dari t tabel 1,673 dan tingkat signifikansi sebesar $0,256 > 0,05$ serta dibuktikan dari presentase sebaran frekuensi pada kategori rendah yaitu sebesar 64,4%. Alasan yang dapat dijelaskan atas tidak berhasilnya penelitian ini menerima hipotesis tersebut yaitu Pegawai pengelolaan keuangan SKPD Kota Yogyakarta sebagian besar pegawainya menyusun laporan keuangan belum memahami standar akuntansi terbaru, hal ini dapat terjadi karena kurangnya pelatihan dan pengenalan standar akuntansi pemerintah berbasis akruar serta pegawai yang menyusun laporan keuangan belum disesuaikan dengan tingkat pendidikan.

d. Pengujian Hipotesis 4

Hasil uji hipotesis 4 menyimpulkan bahwa pengungkapan laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dibuktikan dengan hasil uji t hitung 0,281 lebih rendah dari t tabel 1,673 dan tingkat signifikansi sebesar $0,780 > 0,05$, serta dibuktikan dari presentase sebaran frekuensi berada pada kategori sedang yaitu sebesar 47,5%. Alasan yang dapat

dijelaskan atas tidak berhasilnya penelitian ini menerima hipotesis tersebut yaitu bahwa pengguna laporan keuangan daerah mempunyai persepsi bahwa tingkat akuntabilitas suatu laporan keuangan tidak tergantung dari tingkat pengungkapan yang lengkap termasuk informasi tentang kebijakan fiskal atau kebijakan keuangan, ekonomi makro, pencapaian target berikut kendala dan hambatan. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sukhemi (2016) yang menyatakan bahwa pengungkapan laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Tingkat pengungkapan informasi-informasi tambahan dari pemerintah daerah, yang dipandang tidak sesuai dengan persepsi pengguna informasi, justru dapat menjadi sebuah point yang mengurangi tingkat akuntabilitas laporan keuangan daerah.

SIMPULAN

Responden dalam penelitian ini berjumlah 73 pegawai bagian keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,
- b. Aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- c. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- d. Pengungkapan laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

REFERENSI

- Amin, A. (2016). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makasar*.
- Aprilia, N., Hatta, M., Marietza, F., & Kresna, N. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi FEB Universitas Bengkulu*, 3(1).
- Fadli, M. R. (2017). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus)*.
- Fatonah, N. F. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pada Pemerintah Kota Bandung)*.
- Fauziya, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(6), 1–15.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*.
- Hasibun, & Hidayah, N. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Empiris Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
- Medynatul. (2017). *Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Lima Puluh Kota)*.
- Neliana, T. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2).
- Pramudita, A. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Value For Money dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Pemerintah Daerah (ODP) Kabupaten Ponorogo)*.
- Putri, F. E. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Tingkat Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Provinso Riau). *JOM Fekom*, 4(1).
- Putri, M. N. F. (2018). *Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Wonogiri)*.
- Riana, U. A. H. (2017). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Aksesibilitas dan Ketepatanwaktuan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Sleman)*.
- Santoso, E. B. (2016). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah*.
- Sari, E. W. (2017). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan*

Keuangan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu. *JOM Fekon*, 4(1).

Sukhemi. (2016). Pengaruh Aksesibilitas dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

Susanti, L. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Tentang Peraturan, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) di Kabupaten Kulonprogo. Uni.

Tyasta, D. P. (2017). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang*.

Wahida. (2015). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara*.

Widyastuti, N. M., Sujana, E., & Adiputra, M. P. (2015). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Kabupaten Gianyar. *E-Journal SI Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, 3(1).